

SINOPSIS

Semenjak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 lalu, berbagai tuntutan reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa menghentak atmosfer kehidupan nasional. Meskipun bermula dari krisis ekonomi, bola tuntutan reformasi itu bergulir deras ke bidang politik. Soehartopun dengan berat hati melepaskan jabatan presiden yang sudah dinikmatinya selama 32 tahun. Selama 32 tahun itulah pembangunan ekonomi dibangun di atas praktek kejahatan-kejahatan politik dan nafsu pribadinya.

Dalam perspektif demikian, munculnya cendekiawan-cendekiawan kritis seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid akan sangat membantu memberikan tawaran solusi atas berbagai persoalan sosial-ekonomi-politik yang memang sangat kompleks. Pemikiran pemikiran kritis para cendekiawan itu bisa membuka perspektif baru dan mampu memberikan semacam pencerahan dalam kehidupan politik nasional. Tokoh-tokoh tersebut memiliki *political leverage* cukup tinggi untuk mampu menahan terjadinya radikalisme massa berfungsi untuk membuka jalan dan menjadi semacam personifikasi dalam proses persiapan menghadapi akhir dari kemelut yang lama melanda negeri ini.

Setelah momentum penting bangsa ini muncul, yaitu saat Soeharto mundur dari jabatannya dan menyerahkan kepada BJ. Habibie untuk melanjutkan tampuk kekuasaannya dengan dibebani tantangan yang sangat berat akibat ketidakberesan yang ditinggalkan Soeharto. Telah diketahui secara luas bahwa pemerintahan BJ. Habibie merupakan pemerintahan sementara atau transisi. Dalam melaksanakan reformasi dan memmasyarakatkan demokratisasi serta memulihkan kepercayaan dalam dan luar negeri, pemerintah Habibie banyak melakukan manuver politik.

Sebagai dampak reformasi terhadap sistem politik Indonesia, maka muncul partai-partai baru, dengan berdirinya partai baru memberi perubahan wacana politik. Pemerintah sementara untuk pemilu, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan demokratisasi. Kebebasan pers, pers merupakan sarana untuk mendapatkan informasi, yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya. Dengan dicabutnya SIUPP membuka peluang untuk kebebasan pers. Kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan berserikat. Pembebasan tapol dan napol. Era reformasi merupakan era kebebasan, begitu pula dengan pembebasan tapol dan napol seperti dibebaskannya Muhtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas serta yang lainnya. Dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan guna membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa tentunya harus bebas KKN sehingga akan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Demikianlah sedikit deskripsi bagaimana dampak reformasi terhadap sistem politik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis.